

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DAN TENAGA MEDIS SERTA RUMAH SAKIT

NADYA SAID / D 101 09 693

(Abstrak)

Hubungan Hukum antara Pasien dan Tenaga medis serta Rumah sakit memiliki 2 (dua) Rumusan Masalah yaitu, Bagaimanakah hubungan hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis dalam memberikan pelayanan kesehatan ? dan Seberapa besar tanggung jawab hukum pelayanan publik rumah sakit ? Adapun Tujuan Penelitian yaitu, Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan hukum antara Pasien dengan Tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan dan Untuk mengetahui dan mempelajari batas tanggung jawab hukum pelayanan publik rumah sakit.

Kegunaan Penulisan, Secara Teoritis yaitu, tulisannya ini, diharapkan dapat menambah bahan bacaan di Perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan materi Hukum Kesehatan, Hukum Perjanjian atau Kontrak atau hukum perlindungan konsumen Kesehatan; Secara Praktis yaitu, tulisan ini, di harapkan dapat menjadi bahan acuan para praktisi hukum, Masyarakat, lembaga atau Organisasi yang konsent dengan kesehatan masyarakat (Pelayanan Kesehatan) misalnya Tenaga Medis (Dokter, Suter dan Pihak Rumah Sakit), agar mengetahui hak dan Kewajibannya dalam rangka memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat. Metode Penelitian yaitu, Penulis melakukan pendekatan-pendekatan Penelitian Hukum Normatif yaitu, mengkaji berbagai norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penulis tentang Hubungan Hukum antara Pasien, Rumah Sakit dan penerapan informed consent.

Kata Kunci : Pasien, Tenaga Medis dan Rumah Sakit.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Seringkali mereka secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan,

serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya, bahkan tidak jarang mereka mencari pendapat kedua. Hak-hak konsumen kesehatan masih cenderung sering dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan,

kekalahan tersebut bisa berupa kerugian moral dan material yang cukup besar. Jenis-jenis masalah perlindungan konsumen sejak berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
(UUPK) mempunyai 2 sasaran pokok, yaitu :

1. Memberdayakan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha (publik atau privat) barang dan atau jasa;
2. Mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab
Lalu pertanyaannya, apakah pasien dapat disebut sebagai konsumen, dan pemberi pelayanan kesehatan (dokter) sebagai pelaku usaha.

Pengertian konsumen dan pelaku usaha berdasarkan UUPK yaitu, **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sedangkan produk berupa barang, misalnya, obat-obatan, suplemen makanan, alat kesehatan, dan produk berupa jasa, misalnya: jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, jasa asuransi kesehatan
Untuk mengetahui, apakah profesi pemberi pelayanan kesehatan (dokter) merupakan pelaku usaha atau bukan maka kita harus melihat UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan, sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (sebelumnya diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan), dan lebih lanjut PERMENKES Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medis sebelum melakukan suatu tindakan yang didahului oleh penjelasan-penjelasan yang menyangkut tindakan, resiko, yang akan dilakukan pada pasien. Pasien maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada petugas kesehatan.

Adanya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MENKES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi Perdagangan dan Jasa di Bidang Kesehatan, berarti UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga dapat diberlakukan pada bidang kesehatan Dengan berlakunya UUPK diharapkan posisi konsumen sejajar dengan

pelaku usaha, anggapan bahwa konsumen merupakan raja tidak berlaku lagi mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak hanya mempunyai hak namun juga memiliki kewajiban.¹

Pasien sebenarnya merupakan faktor *liveware*. Pasien harus dipandang sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar obyek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.²

Penandatanganan formulir atau lembar persetujuan tindakan medis mempunyai konsekuensi telah tercapai apa yang

¹ C.S.T. Kansil. 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15-17.

² Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1989. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta

dinamakan “**sepakat para pihak yang mengikatkan diri, terjadi perjanjian untuk melaksanakan tindakan medis**”.³

Persetujuan ini mempunyai kekuatan mengikat dalam arti mempunyai kekuatan hukum, berarti dokter boleh menjalankan kewajibannya memberikan informasi dan memberikan hak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis. Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan masalah tanggung jawab secara hukum pidana dan atau hukum Perdata⁴

Hubungan Hukum antara Pasien dan Rumah Sakit yaitu :⁵ Perjanjian perawatan yaitu, kesepakatan

antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawat yang akan melakukan tindakan perawatan; dan Perjanjian pelayanan medis yaitu, kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis dalam memberikan pelayanan kesehatan ?
2. Seberapa besar tanggung jawab hukum pelayanan publik rumah sakit ?

II. PEMBAHASAN

A. Hubungan hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis dalam memberikan pelayanan kesehatan.

³ Veronica Komalawati. 1989. *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;

Sudikno Mertokusumo; Malpraktek dan Pelayanan Kesehatan serta Tantangannya Dalam Era Globalisasi.hlm4-5.

Hendrojono Soewono. 2007.*Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Jakarta, Hlm.9-11.

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (zaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik.⁶

Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah Pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien.

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini

berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip “father knows best” yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit, dan dalam hal ini dokterlah yang dianggapnya mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting daripada pasien.

a. Hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan, secara umum hak pasien tersebut dapat dirinci sebagai berikut:⁷

1. Hak pasien atas perawatan,

⁶ Endang Kusumah Astuti, 2003, Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis, Semarang, hlm.3; Lebih lanjut : Chrisdiono M. Achadiat., 2004. *Hukum Medik*, Balai Penerbit FKUI, Ctk. Pertama, Jakarta

⁷ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 33.

2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan,
3. Kewajiban memenuhi aturan-aturan pada kesehatan
4. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan
5. Kewajiban memberikan imbalan jasa
6. Menyimpan rahasia pribadi dokter yang diketahuinya Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi.
7. Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi dapat dirumuskan sebagai berikut:⁸
 - a. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan sejujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik.
 - b. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien.
 - c. Hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya

dalam melaksanakan transaksi terapeutik.

- d. Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya.
- e. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medic dari pasien atau keluarganya.

Hak-hak tersebut di atas, dokter juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 9

1. kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, yaitu dengan cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman.
2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien, antara lain rahasia atas kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia.
3. Kewajiban untuk memberikan informasi pada pasien dan/atau keluarganya tentang tindakan medis yang dilakukannya dan risiko

⁸ Bahder Johan Nasution ,*Op.Cit.*, hal. 35. Lebih lanjut : Nasruddin Andi Mappaware, dkk. 2010. *Pengantar Bioetika, Hukum Kedokteran dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta;

⁹ Y.A Triana Ohoiwutun, 2007, bunga rampai hukum kedokteran, Malang:Bayu Media Publishing, hlm. 17.

yang mungkin terjadi akibat tindakan medis tersebut.

4. Kewajiban merujuk pasien untuk berobat ke dokter lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik.
5. Kewajiban untuk memberikan pertolongan dalam keadaan darurat sebagai tugas perikemanusiaan.

b. Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Pasien

Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien. Antara lain adalah:

Tanggung Jawab Etis :
terjadinya Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum

dari tindakan dokter. Menurut Pasal 1426 KUH Perdata ganti rugi yang dapat dibebankan jika terjadi Wanprestasi adalah, Kerugian yang nyata-nyata diderita kreditur yang disebut dengan *Damnun Emergens*; Keuntungan yang seharusnya diperoleh yang disebut *Lucrum Cegans*. Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan keadaan semula (*innatura*) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan

bentuk atau wujud ganti rugi.¹⁰

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah honorarium. Sedangkan dokter sebenarnya harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikatkan dirinya

untuk memberikan bantuan sedapat-dapatnya, sesuai dengan ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya. Artinya, dia berjanji akan berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan

pasien. Tanggung Jawab Perdata Dokter Karena Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*). Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata¹¹

- 1) Adanya tindakan atau perbuatan Unsur-unsur yang tersimpul dari perumusan Pasal 1365 adalah:
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrecht matigedaad*)
- 3) Pelakunya mempunyai unsur salah
- 4) Tindakan atau perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata, Seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai,

Mariam Darus Dadrulzaman, 1983, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 29.

¹¹ J. Satrio, 1993, Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 139

sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata, menyatakan : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, apabila kita simpulkan maka dari segi hukum perdata, tanggung jawab tersebut dapat mengandung beberapa aspek yaitu dapat ditimbulkan karena “wanprestasi” (tidak memenuhi prestasi), karena perbuatan melanggar hukum (onrecht matigedaad), dapat juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan matinya orang (moedwillige/onrecht matigedoodslag) dan juga karena kurang hati-hatinya

mengakibatkan cacat badan¹².

c. Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien

Hubungan hukum dokter-pasien akan menempatkan dokter dan pasien berada pada kesejajaran, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tersebut harus melibatkan pasien dalam menentukan apakah sesuatu tersebut dapat atau tidak dapat dilakukan atas dirinya. Salah satu bentuk kesejajaran dalam hubungan hukum dokter-pasien adalah melalui informed consent atau persetujuan tindakan medik. Pasien berhak memutuskan apakah menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya rencana tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter

¹² Hermien Hadiati Koeswadi, 1984, Hukum dan Medik, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 36.

terhadap dirinya. UU RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, khususnya mengatur tentang Hak dan Kewajiban Dokter atau tenaga medis, dokter mempunyai hak:

1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
3. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dan pasien atau keluarganya;
4. menerima imbalan jasa.

Hubungan hukum dokter pasien mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat-syarat sahnyanya sebuah perjanjian atau perikatan hukum Syarat-syarat tersebut yaitu antara lain :

1. Pelaku perjanjian harus dapat bertindak sebagai subjek hukum
2. Perjanjian antara subjek hukum tersebut harus atas dasar sukarela dan tanpa paksaan,
3. Perjanjian tersebut memperjanjikan sesuatu di bidang pelayanan kesehatan,
4. Perjanjian tersebut harus atas sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum.

d. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum perjanjian terapeutik dengan pasien sebagaimana yang diatur dalalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit, yaitu dalam Pasal 30

menyatakan **Hak-Hak Rumah Sakit**, yaitu :¹³

1. Menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi rumah sakit;
2. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan renumerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
4. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan;
5. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
6. Mendapatkan perlindungan hukum

dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;

7. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.

Kewajiban Rumah Sakit, Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2009, yaitu :

1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

Eman Suparman. 2005. *Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi Tenaga Kesehatan*, Malang, Hlm 21-25; Lebih lanjut : H. Amy Isfandyarie. 2006. *Tanggung Jawab Umum dan Sanksi bagi Dokter*, Buku I

4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu/ miskin;
6. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulance gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
7. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
8. Menyelenggarakan rekam medik;
9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parker, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, usai lanjut;
10. Melaksanakan sistem rujukan;
11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
12. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
13. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
14. Melaksanakan etika rumah sakit;
15. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
16. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun

- nasional;
17. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
 18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit/hospital Laws
 19. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas;
 20. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit, kawasan tanpa rokok.

B . Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Publik Rumah Sakit

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. yang mempunyai tanggung jawab publik atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya.

Tanggung jawab publik

rumah sakit yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah sebuah hubungan perdata yang menekankan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Rumah sakit berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pasien dan sebaliknya pasien berkewajiban memenuhi hak-hak rumah sakit. Kegagalan salah satu pihak memenuhi hak-hak pihak lain, apakah karena wanprestasi atau

kelalaian akan berakibat pada gugatan atau tuntutan perdata yang berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien.

Dalam hubungan antara dokter dan pasien sering timbul masalah dengan adanya dugaan terjadinya kelalaian medis, hal itu dapat juga disebabkan karena kurangnya pemahaman atau persepsi yang sama atas hak dan kewajiban baik pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Masalah hukum yang timbul tersebut dapat diakibatkan kesalahan atau kelalaian para petugas di Rumah Sakit atau diakibatkan kesalahan dalam menerapkan kebijaksanaan atas peraturan dan juga diakibatkan kekurangan pengetahuan para petugas tentang Hukum Kesehatan atau peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan. Perkembangan saat ini masyarakat semakin sadar atas hak-haknya yang

secara otomatis menuntut adanya transparansi pelayanan kesehatan, terutama dalam kaitan hubungan dokter dengan pasien dan menyangkut keluhan yang dialami pasien serta terapi, pengobatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Hal yang sangat mendasar dalam pelayanan kesehatan yang selalu dipermasalahkan masyarakat, pasien adalah menyangkut keterbukaan, transparansi, mutu pelayanan, penerapan aturan, kedisiplinan waktu, sehingga sering diduga melakukan kelalaian medis atau musibah klinis.

Dalam hal ini, rumah sakit harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui pembentukan berbagai perangkat aturan di rumah sakit meliputi, peraturan

internal staf medis, standar prosedur operasional dan berbagai pedoman pelayanan kesehatan serta melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang medikolegal. Hal lain yang perlu mendapat perhatian bersama oleh seluruh pihak di rumah sakit adalah menyangkut pelaksanaan etika profesi dan etika rumah sakit sehingga penyelenggaraan Pelayanan secara beretika akan sangat mempermudah seluruh pihak dalam menegakkan aturan-aturan hukum.

Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Tenaga Medis atau Dokter dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan Medis. Adapun dalam suatu sistem kesehatan, interaksi yang nampak menonjol adalah interaksi antara dokter dan pasien yang mungkin juga melibatkan unsur-unsur lainnya. Unsur-unsur lain tersebut mungkin para medis baik bagian perawatan

maupun non perawatan, pekerja sosial dan rumah sakit, di mana mereka secara pribadi atau bersama-sama terikat oleh kaidah-kaidah tertentu, baik kaidah-kaidah hukum maupun kaidah sosial lainnya. Sistem kesehatan, yang menonjol adalah profesi kedokteran, karena menurut anggapan umum, seseorang yang mempunyai profesi ini adalah menyenangkan, yaitu dianggap merupakan profesi yang mulia. Oleh karena itu perlunya di tinjau kembali Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dirasakan belum memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masih sangat kurang. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan

oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medik terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. **Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan** yaitu, Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap Tenaga Medis (dokter atau Perawat) sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (*informed consent*), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang

mungkin terjadi. Adapun di Indonesia *informed consent* dalam pelayanan kesehatan, telah memperoleh pembenaran secara yuridis melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/1989. Hubungan tersebut lahir dan memenuhi syarat sahnya transaksi terapeutik didasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Yaitu, Syarat Subyek an Syarat Obyek.

2. **Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Publik Rumah Sakit** yaitu, Tanggung jawab publik rumah sakit yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (health receiver), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan (*health receiver*) demi untuk

mewujukan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

B. SARAN

Adapun permasalahan di atas, maka disarankan agar segala sesuatu yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dalam upaya peyembuhan penyakit pasien adalah merupakan perbuatan hukum yang kepadanya dapat dimintai petanggung jawaban

hukum, dituntut profesionalisme, memberikan pelayanan medik adalah sebuah perbuatan hukum. Dalam benak para teman sejawat tiada lain hanyalah melakukan tindakan profesional kedokteran harus sesuai dengan kode etik profesional dan sumpah jabatan dokter.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Jakarta:Rineka Cipta,
- C.S.T. Kansil. 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Eman Suparman. 2005. *Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi Tenaga Kesehatan*, Malang
- Endang Kusumah Astuti, 2003, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang,
- Hendrojono Soewono. 2007. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Jakarta
- H. Amy Isfandyarie. 2006. *Tanggung Jawab Umum dan Sanksi bagi Dokter*, Buku I
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, *Hukum dan Medik*, Surabaya:Airlangga University Press,
- Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1989. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta
- J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti,
- J. Guwandi. 1991. *Dokter Dan Hukum*, Monella, Jakarta
- ,1995,Persetujuan tindakan medis(informed consent),Jakarta:FK UI
- ,1994. *Kelalaian Medik*, Fakultas Kedokteran Univ Indonesia, Jakarta
- , 2004. *Hukum Medik*, Balai Penerbit FKUI, Ctk. Pertama, Jakarta
- ,2005. *Informed Consent*, dan *Rahasia Medis*, Jakarta
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Bandung, 2005,
- Nasruddin Andi Mappaware, dkk. 2010. *Pengantar Bioetika, Hukum Kedokteran dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta;
- Ratna Suprpti S. 2001. *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta
- Syafitri Haryani, 2005, *Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Antara Dokter Dengan Pasien*, Jakarta:Diadit Media,
- Sudikno Mertokusumo; Malpraktek dan Pelayanan Kesehatan serta Tantangannya Dalam Era Globalisasi
- Y.A Triana Ohoiwutun, 2007, *bunga rampai hukum kedokteran*, Malang:Bayu Media Publishing,
- Veronica Komalawati. 1989. *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;
- Veronika Komalawati, *Informed Consent dalam Pelayanan Medis*, 1989,

B. Internet :

<http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/07/malpraktek-dan-pelayanan-kesehatan>

BIODATA



I. IDENTITAS PRIBADI

Nama	: Nadya Said
Tempat Tanggal Lahir	: Palu, 31 Maret 1990
Jenis Kelamin	: Perempuan
Anak Ke	: 4(empat) Dari 5(lima) Bersaudara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jln. Gunung Loli No 32 Palu
Status	: Belum Kawin
E-mail	: Nadya.said31@gmail.com